

Dampak Jejak Sejarah Terhadap Kehidupan Sosio Religius di Wilayah Utara Kabupaten Ende

Fransiskus Z.M. Deidhae

Sekolah Tinggi Pastoral Atmareksa Ende, Indonesia
Email: deidhae@gmail.com

(DOI: 10.53949/arjpk.v10i1.98)

Received: 17 Januari 2026 ; Accepted: 26 Januari 2026; Published: 31 Januari 2026

Abstrak: Kesenjangan perkembangan antara kelompok sosial seringkali dikaitkan dengan kehidupan ekonomi. Namun fenomena yang terjadi di wilayah Kabupaten Ende menunjukkan kesenjangan terjadi pula dalam kehidupan sosio religius antara kelompok umat katolik yang mendiami wilayah utara dan wilayah selatan kabupaten. Kehidupan religius umat katolik di wilayah selatan tampak lebih berkembang ditandai dengan tingkat partisipasi menggereja lebih tinggi, jumlah panggilan menjadi imam serta kaum religius yang lebih banyak, dan praksis kehidupan sehari-hari yang lebih luas. Penelitian yang bercorak kualitatif dengan mengandalkan studi dokumentasi dan wawancara membuktikan bahwa faktor pemicu ketimpangan hidup iman ialah sejarah masa lalu khususnya ketiadaan wahana pendidikan iman. Lembaga pendidikan yang berkembang di Kabupaten Ende dimulai di wilayah selatan sedangkan di wilayah utara perkembangan pendidikan baru dimulai beberapa dekade kemudian. Selain itu, pusat pelayanan misi gereja dan peran para tokoh seperti misionaris dan guru pada awalnya berada di wilayah selatan yang padat penduduk; wilayah utara yang lebih luas tetapi jumlah penduduk jarang hanya dilayani satu pusat misi dengan jumlah imam dan guru yang terbatas. Selain itu sejumlah faktor lain berkontribusi bagi ketimpangan seperti struktur sosial dengan identitas kelompok yang labil diperpuruk dengan kesulitan akses politik dan ekonomi yang berpusat di kota Ende serta sarana transportasi yang sulit hingga akhir tahun 1980-an.

Kata Kunci: Religiositas; Ketertinggalan Budaya; Identitas

Abstract: The developmental disparities observed between various social groups are frequently associated with economic factors. However, the phenomena occurring in the Ende Regency show that disparities also exist within socio-religious life between Catholic communities inhabiting the northern and southern regions. The religious life of Catholics in the southern region appears more developed, characterized by higher church participation rates, a greater number of vocations to the priesthood and religious life, and a more extensive integration of faith into daily practice. This qualitative study, which relies on documentation and interviews, demonstrates that the primary factor triggering this inequality in faith life is historical, specifically the absence of faith education platforms in the past. The establishment of educational institutions in Ende District initiated in the southern region, while the north saw educational advancements commence several decades later. Furthermore, church mission centers and the roles of key figures, such as missionaries and teachers, were initially concentrated in the more densely populated southern area; the northern region, which is larger but more sparsely populated, was served by only one mission center with a limited number of priests and teachers. Additionally, several other factors contributed to this disparity, including social structures with unstable group identities, further exacerbated by difficult access to political and economic resources centered in Ende City, as well as challenging transportation infrastructure until the late 1980s.

Keywords: Religiosity; Cultural Lag; Identity

I. PENDAHULUAN

Kelompok masyarakat Kabupaten Ende seringkali disegregasi berdasarkan dialek antara *ata Lio* dan *ata Ende* (orang Lio dan orang Ende), atau berdasarkan segregasi geografis, orang utara yang mendiami bentangan pantai utara dan orang selatan. Segregasi ini secara implisit menggambarkan perbedaan tingkat kemajuan antara kedua wilayah. Orang di selatan Ende pada masa lalu memiliki label negatif atau bahkan semacam *prejudice* terhadap penduduk wilayah utara kabupaten yang dipandang lebih tertinggal. Ungkapan sebagai *ata longgo* (orang dari belakang gunung atau terbelakang) secara implisit menunjukkan bahwa masyarakat utara mengalami ketertinggalan budaya. Sampai dengan awal tahun 1980-an belum ada jalan aspal yang menghubungkan wilayah utara dengan kota Ende yang terletak di pantai selatan. Sementara di wilayah selatan kabupaten, sejak masa pemerintah Belanda pada periode 1920-an, telah dibangun jalan raya yang menghubungkan wilayah Flores. Saat ini, wilayah selatan yang dekat dengan ibukota kabupaten memiliki akses transportasi darat, laut, dan udara yang memadai. Sementara transportasi ke wilayah utara masih mengalami kesulitan karena kondisi jalan raya yang rusak. Tidak mengherankan bila salah satu prioritas pembangunan kabupaten ialah peningkatan jalur jalan raya ke pantura (Perbup Ende No. 26 Tahun 2024_1, 2024).

Sinyalemen kemajuan ini tidak hanya mencakupi bidang sosio ekonomi, melainkan merasuki pula bidang hidup keagamaan. Sebagai kabupaten dengan mayoritas penduduk beragama katolik, tingkat religiositas masyarakat pantai utara (pantura) yang meliputi penghayatan, kepatuhan, dan praktek ritual serta perilaku sehari-hari tampaknya tidak sepesat perkembangan di wilayah selatan. Beberapa indikator yang dapat menunjukkan ketertinggalan aspek religiositas iman ini ialah partisipasi dalam ibadah, jumlah panggilan khusus menjadi kaum religius, dan praktek hidup harian dalam beragama.

Data sementara dari statistik keuskupan menunjukkan jumlah panggilan di selatan jauh lebih besar daripada wilayah pantura. Sejarah Gereja Keuskupan Agung Ende mencatat bahwa tahbisan imam perdana di Kabupaten Ende terjadi pada tahun 1959 yang menahbiskan tiga imam yaitu P. Robert Rewu, SVD, P. Darius Nggawa, SVD, dan Rm Yan Mbenu, Pr. Kedua imam SVD berasal dari wilayah selatan sedangkan Rm. Yan berasal dari utara, Detukeli. Sejak tahun 1959, hampir setiap tahun wilayah selatan menghasilkan imam dan bahkan dalam jumlah yang lebih dari 1, sedangkan wilayah utara hanya menghasilkan beberapa imam selama beberapa dekade, seperti Rm Domi Balo pada tahun 1970, dan generasi selanjutnya pada tahun 1980-an dan 1990-an, seperti P. Kornelis Kei (1987), Rm Willy Boy (1989), P. Poly (1992), Rm Feri (1993), Rm Seli (1994) dan selanjutnya beberapa orang di dekade 2000 sampai 2025. Jumlah panggilan menjadi biarawati pun amat sedikit dibandingkan dengan di wilayah selatan.

Dalam kehidupan iman, masyarakat di wilayah utara lebih cenderung mempraktekkan agama asli atau animisme dibandingkan dengan katolik sebagai agama modern yang dianutnya. Praktek hidup sehari-hari mengungkapkan relasi yang kabur bahkan tumpang tindih antara agama katolik sebagai praksis elit yang berasal dari barat dengan kehidupan harian masyarakat yang tetap menghidupi adatnya (Howell, 2016). Dalam kehidupan sehari-hari, praksis agama yang mengajarkan kasih seringkali bertentangan dengan prinsip lokal yang cenderung menggunakan kekerasan (Haryanto & Soukotta, 2025). Fenomena yang sama digambarkan pula beberapa penelitian di Toraja dan Mauritius (Veerasamy et al., 2023; Maćkowiak, 2024).

Fenomena ini dipertegas dengan jumlah partisipasi dalam ibadah rutin seperti hari Minggu dan kegiatan komunitas basis yang rendah. Berdasarkan fenomena ini, pada tahun 2025 lalu, Mgr. Budi Kleden sebagai pemimpin keuskupan menggagaskan gerakan khusus untuk pengembangan wilayah pantura. Latar belakang dan fenomena ini memicu peneliti untuk menelisik bagaimana jejak sejarah masa lalu memengaruhi religiositas umat pantura sekarang. Selain menganalisis kehidupan sosio religius, peneliti mengaitkan pula dengan konteks sosial yang terjadi di pantura. Selain teori perkembangan religius, dalam penelitian ini juga digunakan teori perkembangan sosial yang menggambarkan asumsi perkembangan suatu kelompok sosial.

Dari perspektif teori pembangunan, perubahan budaya suatu masyarakat dipengaruhi

kekuatan sumber daya yaitu kepemilikan aset dan peluang akses. Sejak tahun 1970-an, *United Nations Development Program* (UNDP) dan *World Bank* menganut keyakinan bahwa melalui tiga strategi pembangunan orang miskin akan diberdayakan. Ketiga strategi utama ini meliputi pemberian aset ekonomi berupa tanah atau modal serta kredit usaha, penyediaan sarana kesehatan dan fasilitas pendidikan yang memadai. Indikator yang dipakai dalam strategi ini ialah income, angka harapan hidup dan angka kematian bayi di bawah lima tahun (standar kesehatan) dan angka melek huruf usia dewasa (ukuran pengetahuan/pendidikan) (The World Bank, 1990) Pemilikan aset dan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar diyakini akan memberdayakan kelompok terpinggirkan dan selanjutnya akan mampu melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Sejak akhir dekade 1990-an, strategi pembangunan bergeser dari pengendalian aset dan akses kepada kekuatan modal sosial. Teori modal sosial menawarkan paradigma baru bahwa perubahan sosial amat ditentukan kohesi sosial suatu kelompok masyarakat. Kohesi sosial yang membentuk modal sosial didukung sejumlah faktor yaitu saling percaya (*trust*), kerjasama, serta penghayatan nilai bersama, yang disokongi struktur institusi sosial seperti institusi adat, agama, pemerintahan, dan ekonomi. Teori ini didukung fakta bahwa negara-negara atau kelompok masyarakat yang berkembang pesat tidak bergantung pada kekayaan sumber daya alam melainkan karena modal sosial yang dimiliki (Joustra, 2006). Suatu fakta paradoks, banyak wilayah yang berpotensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang kaya meliputi kuantitas dan keterampilan namun tertinggal dalam kemajuan.

Dari berbagai teori pembangunan, teori *cultural lag* (ketertinggalan budaya) secara detail menjelaskan konsep kesenjangan sosial. Ogburn (dalam Soekanto, 2013) mengatakan bahwa fenomena perubahan sosial, politik dan kultural amat dipengaruhi kondisi perubahan ekonomi, teknologi, geografi, dan biologis. Namun diingatkannya bahwa determinisme ekonomi tidak mutlak karena dalam konteks tertentu perubahan sosial, politik, kultural tidak selalu kongruen dengan perubahan ekonomi. Sebagai contoh, perubahan ekonomi yang menuntut keterlibatan perempuan di sektor publik tidak sejalan dengan perubahan paradigma tentang peran perempuan di sektor domestik. *Cultural lag* terjadi ketika salah satu atau beberapa variable sosial menjadi disosiasi atau tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Secara spesifik, budaya material seperti teknologi cenderung berkembang lebih cepat dibandingkan dengan budaya non-material yakni nilai, norma, dan adat istiadat (Abercrombie et al., 2000; Koentjaraningrat, 1985).

Sejalan dengan pemikiran Ogburn yang berpendapat bahwa perubahan kebudayaan amat berhubungan dengan kondisi ekonomis dan teknologi, Mac Iver (Soekanto, 2013) menggarisbawahi bahwa yang paling cepat dan mudah berubah ialah *utilitarian elements* dan bukannya *cultural elements*. *Utilitarian element* berhubungan dengan *civilisasi* yakni kebutuhan sekunder seperti teknologi yang menunjang kebutuhan primer (ekspresi jiwa, nilai, kepercayaan).

Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi informasi melalui internet dan media sosial begitu pesat tetapi di sisi lain masyarakat masih bergulat dengan upaya adaptasi diri dalam bidang norma perilaku seperti norma seksual dan norma pergaulan (www.cnnindonesia). Seksualitas dan pornografi yang menggerayangi kaum muda seakan tidak sanggup dibendung oleh struktur sosial termasuk norma dan perilaku kolektif.

Sejumlah studi membuktikan bahwa perkembangan kelompok masyarakat biasa dipengaruhi sejumlah faktor internal maupun eksternal. Ketimpangan perkembangan ekonomi dan sosial antar wilayah dapat dipicu sejumlah faktor seperti perbedaan kondisi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia (Syaifudin et al., 2022; Al Majiid & Woyanti, 2023).

Perkembangan infrastruktur transportasi merupakan pendukung utama perkembangan suatu wilayah. Studi yang menggunakan uji statistic di Lampung, Sumatera menunjukkan bahwa jalan bebas hambatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan

partisipasi angkatan kerja yang selanjutnya berdampak pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (Al Fadhil et al., 2023).

Penelitian Asian Development Bank (Dartanto et al., 2017) menampilkan perkembangan income per capita di Indonesia melonjak drastis selama 3 dasawarsa yakni dari \$1.095 di tahun 1980 menjadi \$3,834 di tahun 2015. Tetapi peningkatan income tidak sejalan dengan kesetaraan ekonomi, malahan berhubungan negatif karena justru meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Beberapa penyebab utama meningkatnya ketidaksetaraan di Indonesia yakni efek ketidaksetaraan murni yakni efek yang tidak dapat dijelaskan, pergeseran populasi dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dari daerah pedesaan ke perkotaan, dan dari pekerjaan informal ke formal, dan peningkatan tingkat pendidikan selama dua dasawarsa terakhir.

Di samping faktor sumber daya ekonomi yang didukung transportasi yang memadai, perkembangan pembangunan amat ditentukan sumber daya manusia atau yang dikenal sebagai modal sosial yang meliputi saling percaya, kerjasama, relasi resiprokal antar warga yang didukung penghayatan nilai kolektif dan institusi sosial yang kuat. Soliditas masyarakat Karawang, Jawa Barat misalnya sangat efektif memperkuat upaya masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama, baik dengan pihak internal maupun eksternal demi memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat yang lebih luas (Sumardjo et al., 2021). Sebaliknya, ketika masyarakat memberikan tanggapan yang rendah atau negatif terhadap program perubahan karena minimnya kepercayaan sosial justru memperbesar ketertinggalan budaya. Kecurigaan masyarakat terhadap program pemerintah di DKI (Nusyifa, 2018) dan kelompok penguasa yang dituduh mendapat keuntungan besar dalam program pembangunan serta menciptakan *paradoks of plenty*, negara kaya dengan mayoritas orang miskin (Naiya & Manap, 2013) telah memicu semakin melebarnya gap ketertinggalan.

Perubahan sosial dalam pembangunan tidak memiliki rumus mutlak dengan sejumlah faktor determinan yang pasti. Ada berbagai macam variable yang memengaruhi konteks perkembangan suatu kelompok sosial. Studi (Nanga & Widjaja, 2024) menunjukkan korelasi yang kuat antara perkembangan ekonomi, modal manusia, perkembangan keuangan, teknologi digital, dan transformasi struktural. Studi ini menyoroti pentingnya penanganan elemen pertumbuhan ekonomi yang didukung elemen teknologi digital dan modal sosial untuk mempercepat transformasi sosial yang komprehensif. Sejalan dengan pengaruh modal sosial, modal religius seperti ritual keagamaan, aktivitas dan praktik keagamaan memiliki dampak yang secara statistik signifikan terhadap kesejahteraan subyektif (Watts & Munir, 2024).

Studi-studi khusus yang menyoroti perkembangan sosio religius suatu kelompok masyarakat menyimpulkan bahwa sejarah masa lalu seperti perjuangan misi para tokoh sebelumnya dan struktur agama yang menggeser struktur adat (Hafizi, 2024) berperan penting dalam religiositas kelompok yang menggeser identitas lama. Penggeseran identitas budaya ini kadang dilakukan secara koersif seperti praktik pada masa kolonial yang menggusur agama animisme, hukum adat, kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan agama modern dan menjadikan agama baru sebagai identitas kelompok (Tuhri et al., 2020; Muhammad & Aslan, 2025). Gaya proselitisme yang mengadopsi nilai-nilai lokal (Tambunan et al., 2025; Nenohai, 2023) dan upaya inkulturasi melalui pengembangan bahasa daerah dalam liturgi (Widyawati et al., 2025) memberikan pengaruh positif bagi mulusnya adopsi agama baru ke dalam praksis kehidupan sehari-hari.

II. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam yang menghimpun informasi dari sejumlah narasumber. Studi dokumentasi berupaya menggali informasi dari berbagai dokumen sejarah yang menampilkan pilar-pilar perkembangan wilayah utara dan wilayah Selatan Kabupaten Ende. Sedangkan wawancara bertujuan mengkonfirmasi data-data atau fenomena-fenomena

perkembangan di wilayah Kabupaten Ende dan situasi perkembangan lima decade terakhir yang diketahui narasumber. Teknik wawancara mengumpulkan data dari tujuh narasumber yang mengetahui sejarah perkembangan wilayah dan menjadi pemerhati sosial di Kabupaten Ende. Metode analisis komparatif dalam studi ini mengadopsi analisis kecenderungan berdasarkan indikator-indikator kunci yaitu partisipasi dalam ibadah, praktek hidup agama secara pribadi, dan jumlah panggilan khusus menjadi imam serta biarawan-biarawati.

Batas geografis yang memisahkan wilayah utara dan selatan ialah jajaran pegunungan yang memisahkan belahan wilayah utara dan selatan. Jajaran pegunungan tersebut membentang dari Kelisoke - Lepembusu sampai ke Wologai-Boafeo dan Oja. Bertolak dari batasan ini maka dapat dilakukan segregasi kecamatan yang termasuk wilayah utara yaitu Kecamatan Kotabaru, Maurole, Detukeli, Lepembusu-Kelisoke, Wewaria, Maukaro; Sedangkan yang menjadi wilayah Selatan ialah Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ndonga, Ndonga Timur, Detusoko, Wolojita, Kelimutu, Wolowaru, Ndori, dan Lio Timur.

Bila membandingkan luas wilayah kedua batasan wilayah (tanpa memasukkan wilayah Pulau Ende), dari total wilayah 2074,97 kilometer persegi maka total wilayah selatan seluas 947,37 kilometer persegi (45.66%) dan wilayah utara seluas 1127.61 km persegi (54.34%). Namun dari segi kepadatan penduduk, jumlah penduduk wilayah selatan sebanyak 186,604 jiwa (66.9%) dan wilayah utara sebanyak 91,977 (33.1%) (BPS, 2024).

III. HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan wilayah Kabupaten Ende berlangsung dalam konteks sejarah akan pengenalan Pulau Timor dan Flores sebagai wilayah penghasil cendana. Daya tarik ini yang mengundang para pedagang baik dari dalam negeri seperti dari Bima, Makasar, Jawa, maupun dari luar negeri seperti Cina, dan sejumlah negara Eropa yang berdatangan ke wilayah ini sejak abad 15.

Sejak tahun 1600-an, para misionaris Dominikan dan Jesuit yang memboncengi para pedagang memulai misi di Flores Timur. Namun baru pada tahun 1862 sekolah pertama didirikan di Larantuka. Tujuan pendirian sekolah mengandung kepentingan misi namun terutama untuk membebaskan masyarakat dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan (Jebarus, 2008). Visi pembebasan pada hakikatnya berhimpitan dengan semangat kristiani yang bertujuan mewartakan khabar baik (*euangelion*) bagi orang-orang termarginalisasi.

Tonggak perkembangan wilayah Flores pada umumnya dan Ende khususnya berawal dari peralihan misi dari Jesuit kepada misionaris serikat Sabda Allah (SVD) pada tahun 1914. Sejak awal misinya, misionaris SVD memfokuskan strategi pelayanan pada evangelisasi ke wilayah-wilayah baru, pengembangan stasi-stasi baru, perhatian pada pendidikan kaum muda, pembentukan rasul awam, klerus pribumi, dan pengembangan komunikasi sosial (Jebarus, 2008).

Dalam bidang pendidikan, para misionaris pionir mendirikan sejumlah sekolah dan pusat-pusat pelatihan. Pada tahun 1914, sejumlah sekolah sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut sudah menyebar di Maumere, Ende, Ngada, dan Manggarai.

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Flores Tengah dan Barat di tahun 1914

Wilayah	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
Maumere	1 Standar School	28	5
	10 Sekolah Rakyat	20	1159
Ende:	3 Sekolah Rakyat	6	227
Ngada	3 Sekolah Rakyat	3	111
Manggarai	4 Sekolah Rakyat	6	227

Sumber Data: (Lambert Lame Uran, 1980)

Pada tahun 1915, sebuah Standar School didirikan di Ndona untuk melayani kaum muda di wilayah Ende, Lio, Ngada, dan Manggarai. Dan pada tahun 1918 jumlah sekolah rakyat di Flores telah berkembang menjadi 60 satuan Sekolah Desa. Semua Sekolah Desa ini pada umumnya didirikan oleh masyarakat sendiri dengan dukungan dari para misionaris kala itu. Di wilayah Ende-Lio, sekolah pertama didirikan di Kota Ende pada tahun 1911, lalu pada tahun 1912 didirikan lagi dua Sekolah Desa di Wakuleu (Jopu) dan Nangapanda, dan pada tahun-tahun berikutnya di Ndona, Sokoria, Wonda, dan Wololele. Pada tahun 1920 jumlah sekolah di seluruh Flores mencapai 85 unit, tahun 1925 melonjak menjadi 184, dan pada tahun 1932 meningkat menjadi 298 Sekolah Desa dengan 523 guru dan 26,377 siswa. Sesudah itu jumlah sekolah mengalami fluktuasi, naik turun karena mengalami krisis yang dipicu perang dunia kedua. Pada tahun 1942, saat pemerintahan Jepang memasuki wilayah NTT, jumlah riil sekolah sebanyak 277 unit dengan jumlah guru 575 orang, dan 33,600 siswa (Uran, 1980).

Selain sekolah rakyat sebagai unit pendidikan dasar yang mendidik peserta didik selama kurun waktu 3 tahun untuk menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, para misionaris mengembangkan kiprah pelayanan pendidikan dengan membuka sekolah lanjutan seperti Normal School di Larantuka pada tahun 1919, kursus keterampilan bagi para putri Flores di bawah asuhan para suster SSpS yang mulai tinggal di Ndona dan Jopu pada tahun 1924, sekolah vokasional Ambachtschool (1926) di Ende yang mendidik para putra Flores menjadi tukang di bawah asuhan bruder-bruder SVD, Sekolah Guru Bawah (SGB) di Ndona dan Boawae pada tahun 1953, Sekolah Guru Atas di Ndona yang kemudian dipindahkan ke Ndao (1953), dan SMA Syuradikara pada tahun 1953 (Uran, 1980).

Sejalan dengan pembentukan prefektur apotolik Ende, para misionaris mulai mengembangkan pusat-pusat misi atau stasi yang kemudian berkembang menjadi paroki. Pembentukan pusat misi amat mempertimbangkan pusat penyebaran penduduk dan jangkauan atau jarak. Para pastor yang berdiam di pusat pelayanan melakukan kunjungan pelayan rutin ke kampung-kampung di sekitr dengan berjalan kaki atau menunggang kuda. Pada tahun 1911 dibentuk pusat pelayanan atau pusat misi di Ende, lalu dikembangkan pula di Ndona sebagai tempat domisili uskup pada tahun 1914, dan di Jopu pada tahun 1920. Selain pusat misi sebagai paroki, dibuka pula stasi pelayan seperti Detusoko pada tahun 1936, Stasi Wolowaru pada tahun 1939, Stasi Kombandaru pada tahun 1940, dan Stasi Detukeli pada tahun 1947. Pada tahun 1949, Stasi Detusoko secara resmi ditetapkan menjadi paroki yang melayani seluruh wilayah pantura.

Untuk mengefisienkan pelayanan pastoral, para imam melatih para guru sekolah untuk menjadi katekis dan dibantu para guru agama tamatan sekolah rakyat untuk melakukan katekese. Selain bertugas mengajar di sekolah, para guru juga menjadi pemimpin ibadat, mempersiapkan umat menerima sakramen, dan bahkan mewakili pastor dalam urusan tertentu. Peran awam ini ternyata amat efisien dan menjadi tulang punggung pewartaan khabar gembira di wilayah Ende dan Flores pada umumnya. Bila konsili Vatikan II di tahun 1960-an menyerukan pemberdayaan awam dalam gereja, Gereja Flores sejak awal misinya telah melibatkan kaum awam dalam seluruh reksa pastoral.

Selain para pastor misionaris, beberapa komunitas religius dibentuk di beberapa wilayah seperti para bruder SVD di Ende, para suster SSpS di Ende, dan suster CIJ di Ndona dan Jopu. Para biarawan dan biarawati ini menjadi pendukung karya misi secara khusus dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Bila melihat peta penyebaran sekolah dan pusat misi di Kabupaten Ende, hampir semuanya berada di wilayah Selatan. Fakta ini barangkali dilandasi pertimbangan karena mayoritas penyebaran penduduk berpusat di selatan, akses transportasi jalan raya di jalur tengah dan selatan, serta transportasi laut di selatan. Perkembangan pusat misi dan pendidikan di selatan juga menyertakan kehadiran para imam, suster, bruder, dan para guru sebagai tokoh awam yang berperan menjadi misionaris sekaligus sebagai pewarta formal maupun informal.

Sekolah Rakyat pertama di wilayah utara didirikan pada tahun 1922 di Magekoba-Detukeli dan Niopanda-Ndondo; dan baru pada tahun 1928 didirikan sekolah ketiga di

Mukusaki. Pada masa sebelumnya, segelintir orang muda dikirim untuk mengenyam pendidikan di Ndona.

Dari aspek pusat misi, stasi Detukeli yang melayani seluruh wilayah utara baru dimulai pada tahun 1947, setelah masa pendudukan Jepang. Pastor Yan Tol, SVD menjadi imam pertama yang menjadi pelayan seluruh wilayah pantura. Pada masa sebelumnya, para pastor dari Jopu dan Detusoko sebagai pusat misi yang mengunjungi dan memberikan pelayanan bagi umat pantura. Pengembangan pusat misi di pantura baru mulai dilaksanakan pada awal 1970-an dengan pendirian pusat misi baru di Welamosa, Maurole, dan Ratesuba. Dengan jangkauan wilayah yang luas, tanpa sarana transportasi dan akses jalan raya, para misionaris berjuang merawat iman yang baru mulai tumbuh dalam masyarakat lokal.

Peran Lembaga Pendidikan katolik di Flores dan Ende pada khususnya telah membawa perubahan sosial yang signifikan. Para tamatan telah berkiprah menjadi kader masyarakat dan kader Gereja atau sebagai pembantu pastor dalam reksa pastoral. Sementara itu, kehadiran para istri guru yang pada umumnya merupakan jebolan kursus kepandaian putri di asrama suster CIJ dan SSsP - dengan memiliki sedikit keterampilan dalam urusan rumah tangga seperti memasak, menjahit, dan mengatur kesehatan - telah memberikan pengaruh positif bagi para ibu di desa (Jebarus, 2008).

Pengaruh positif ini tidak hanya merebak di bidang sosial melainkan juga dalam bidang kerohanian. Banyak guru sekolah rakyat yang tersebar di Kabupaten Ende sebagian besar berasal dari wilayah selatan seperti Nggela, Jopu, Ndona, dan Wolotopo. Mereka mewariskan pendidikan kepada anak-anak serta anggota keluarga besar mereka. Tidak mengherankan bila tradisi yang baik ini berkembang menjadi praksis kehidupan rohani komunal dalam komunitas dan juga mempengaruhi orang muda untuk menjadi imam atau biarawan/wati.

Dari pemaparan jejak sejarah di atas dapat ditelusuri tiga faktor yang menentukan perkembangan religiositas yaitu kehadiran sekolah-sekolah yang mendidik kaum muda termasuk dalam disiplin hidup religius, pusat misi yang menghadirkan peran para tokoh seperti para misionaris, para guru sekolah, dan guru agama yang direkrut untuk mengajarkan katekese bagi penganut baru, serta akses ekonomi dan transportasi.

Salah satu jejak sejarah yang memicu ketertinggalan masyarakat pantura ialah absennya wahana pendidikan dalam beberapa dekade awal. Hadirnya lembaga pendidikan di wilayah selatan memungkinkan hanya segelintir kaum muda pantura memiliki akses menyenyam pendidikan termasuk pendidikan berasrama. Akses masuk sekolah yang sulit diperparah minimnya akses informasi dan transportasi memberikan peluang kecil bagi orang muda pantura untuk bersekolah pada decade awal misi Gereja Ende.

Di banyak wilayah, instrument kemajuan ditentukan kehadiran lembaga pendidikan dan diperkuat dengan misi gereja yang menanamkan nilai-nilai modal sosial yang kuat. Pendidikan kristiani amat berpengaruh dalam pembentukan karakter termasuk untuk hidup bersama orang lain (Suardana et al., 2023).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kehidupan religius ialah jangkauan pusat pelayanan pastoral pantra yang luas dan terbatas. Dengan wilayah yang lebih luas dari wilayah selatan dan dilayani seorang misionaris di satu pusat Detukeli, kehidupan agama jemaat awal kurang mendapat pelayanan yang efektif. Kondisi tersebut memengaruhi praksis religius yang berkembang menjadi habitus dan tradisi tidak terwujud. Jemaat yang baru berkenalan dengan agama katolik tidak sepenuhnya mengadopsi ajaran menjadi cara hidup di kalangan umat pantura. Umat yang hidup jauh dari jaman pelayanan pastoral tetap mempraktekkan agama asli dan memegang teguh kepercayaan animism. Dalam dualism iman ini, agama katolik menjadi semacam identitas modern sementara di balik itu umat tetap mengenakan identitas asli sebagai orang Lio penganut ajaran asli (Howell, 2016).

Identitas religius yang ambigu ini diperparah dengan identitas kelompok sosial yang rapuh. Dari segi pemukiman, kampung-kampung di wilayah selatan umumnya lebih stabil dan telah dihuni sejak beberapa abad lalu. Dengan sejarah komunitas yang panjang, kohesi kehidupan sosial di wilayah selatan secara otomatis lebih kuat dibandingkan dengan komunitas

yang memiliki sejarah komunal yang singkat. Sebagai contoh, struktur adat di ulayat-ulayat wilayah selatan telah memiliki kepastian tradisi dan tidak gampang digoyahkan. Sebaliknya, di wilayah pantura, pada awal abad ke-20, dataran dan wilayah pesisir umumnya belum dihuni karena ketakutan akan daerah rawa-rawa yang rawan penyakit malaria, penyakit vilaria, dan berbagai penyakit lain. Selain itu, hingga tahun 1950-an, penduduk pantai utara masih dihantui ancaman bajak laut dari Sulawesi. Wilayah-wilayah tersebut seperti Kotabaru, Maurole, dan Welamosa baru mulai dihuni pada akhir tahun 1950-an ketika penduduk pegunungan dikerahkan oleh pemimpin hamente seperti Bapak Wora Gadho untuk membuka lahan persawahan di dataran Mautenda dan Kotabaru.

Perpindahan penduduk ke daerah yang seakan tidak bertujuan menciptakan pola interaksi baru yang secara tidak langsung mengganggu institusi lama. Klaim kekuasaan dan perebutan wilayah mulai terjadi dan bahkan masih sering muncul hingga kini. Klan tertentu mengklaim diri sebagai penguasa dengan menciptakan versi sejarah baru. Dahulu, penghuni dataran dikenal sebagai penjaga pantai atau penjaga batas (*dai ma'u enga nanga* atau *dai singi enga pebi*). Setelah migrasi kelompok dan pertumbuhan penduduk yang memadati wilayah dataran dan pantai, kelompok sosial tersebut merasa lebih otonomi dan mengubah status mereka menjadi tuan, alias *mosalaki pu'u* yang tidak lagi terikat dengan kolegalitas asli di wilayah pegunungan.

Dalam konteks feodalisme Lio, pemimpin kolegal dipahami sebagai pemimpin religius yang mengayomi. Istilah rakyat dalam bahasa Lio dikenal sebagai *ana kalo fai walu* yang berarti yatim piatu dan janda, mengindikasikan status mereka yang memprihatinkan dan perlu dilindungi. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai politisi, melainkan juga sebagai imam yang menghubungkan kehidupan insani dengan yang ilahi, antara yang kodrati dan adikodrati.

Ketika kelompok masyarakat bermigrasi ke wilayah baru, status pemimpin yang dulu bermakna religius sering bergeser ke ranah ekonomi, dan norma kehidupan sosial pun beralih menjadi norma yang sarat dengan kepentingan ekonomis. Pergeseran ini melemahkan kohesi sosial dan religiositas kelompok. Pemimpin yang dulu dipandang berwibawa karena menghadirkan kekuatan adikodrati, kini dilihat sebagai topeng kekuasaan yang memeras dan bahkan menindas warganya. Paradigma ini juga menghilangkan aspek mistik dalam kepemimpinan (Howell, 2016). Tidak mengherankan bila ritus-ritus budaya di wilayah utara cenderung dipandang sebagai proses ritualisasi yang kehilangan dimensi mistis. Gugatan terhadap status para *mosalaki* dan bahkan pernah terjadi pembunuhan *mosalaki* di pantura mengindikasikan krisis lembaga adat dan sekularisasi nilai religius.

Militansi iman juga berkorelasi dengan kehadiran institusi agama yang relevan bagi kehidupan komunitas. Bila Gereja Katolik di wilayah selatan menampilkan diri dengan misi yang bermanfaat bagi umat secara khusus dalam pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi seperti bengkel, bidang pertanian dengan kebun contoh, Gereja awal di pantura hanya berfokus pada pewartaan iman. Hal ini yang barangkali memicu jarak antara kehidupan individual umat dengan Gereja. Agama yang cenderung hanya mengatur relasi dengan yang ilahi atau hanya bergerak seputar urusan kultus-liturgis dan mengabaikan perjuangan konkrit seperti menangani masalah-masalah sosial yang tengah melanda umatnya, maka agama tersebut kehilangan fungsi konkrit. Sebagai konsekuensi, agama akan mengalami *insignifikansi internal* dan *irrelevansi eksternal* atau *insignifikansi sosial*. Kehidupan umat beragama seakan terpisah antara urusan kultus dan dinamika sosial di lingkungan di mana mereka berada. Dan, agama yang demikian cenderung ditinggalkan dan tidak berkembang menjadi identitas kelompok (Darmaputera, 2001; Tuhri et al., 2020; Muhammad & Aslan, 2025).

Di wilayah Kabupaten Ende, pusat ekonomi berada di ibukota kabupaten yang disokong institusi ekonomi seperti pasar, bank, koperasi, serta infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara. Sebagai pusat ekonomi, Kota Ende menjadi pula pusat peredaran uang dan barang. Dengan kemudahan akses ekonomi, penduduk di wilayah selatan akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan wilayah utara. Dalam kompetisi ekonomi makro yang menggerayak kekuatan ekonomi mikro di level lokal termasuk penguasaan pasar masyarakat yang lemah akan semakin termarjinalisasi. Bila tidak diantisipasi, perebutan kuasa ini menciptakan hegemoni

ekonomi politis yang berujung pada hilangnya aset dasar seperti tanah dan laut bagi masyarakat kecil.

Sebagai ibu kota kabupaten, Ende menjelma menjadi pusat politik yang menentukan kebijakan dan arah pembangunan kabupaten. Statusnya sebagai pusat politik menjadikan Kota Ende dan sekitarnya di wilayah selatan sebagai arena interaksi antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di sisi lain, wilayah yang jauh dari pusat dengan jumlah pendukung yang lebih sedikit sering kali berfungsi sebagai *buffer zone* politik atau organisasi sayap politik yang hanya menjadi kelompok bayang-bayangan sebagai pendukung.

Wilayah pantura dalam banyak aspek mengalami ketertinggalan baik dalam aspek ekonomi pembangunan maupun dalam kehidupan sosio religius. Dalam konstelasi kekuasaan dan ekonomi, modal keagamaan dapat diandalkan menjadi kekuatan penangkal dalam membangun resistensi kelompok. Namun, bila modal keagamaan ini lemah, kelompok akan menjadi semakin rentan berhadapan dengan kekuatan ekonomi politis serta manipulasi kelompok lain. Masyarakat pantura yang secara sosio religius mengalami ketertinggalan karena akses pendidikan dan pelayanan pastoral di masa lalu serta diampifikasi akses ekonomi, transportasi, serta sosial lain hingga kini akan menjadi kelompok rentan. Karena itu strategi jitu untuk pengembangan wilayah pantura sebagaimana diserukan uskup Agung Ende perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan.

IV. SIMPULAN

Cultural lag termasuk pula ketertinggalan dalam kehidupan sosio religius ternyata amat ditentukan faktor pendidikan dan kehadiran para tokoh religius sebagai figur model dalam pewartaan. Sejarah Gereja telah membuktikan bahwa pengalaman hidup dan pendidikan Katolik terbukti sukses menciptakan kader-kader Katolik yang militan. Para tamatan yang telah ditempa di lembaga pendidikan akan mewariskan sikap dan militansi iman yang sama kepada anggota komunitas dan generasi berikutnya.

Militansi ini akan semakin subur jika didukung struktur masyarakat yang menghidupi nilai-nilai religius. Lembaga adat dan struktur masyarakat yang secara kondusif mendukung kehidupan akan menyuburkan kehidupan sosio religius dan penghayatan nilai-nilai kristiani.

Kenyataan di wilayah pantura Ende membuktikan bahwa jejak sejarah berupa absennya wahana pendidikan dan model pastoral yang tidak intensif telah menjadi faktor determinan yang menciptakan ketertinggalan sosio religius umat. Kondisi ini diperpuruk dengan labilnya struktur sosial yang berdampak pada rentannya kohesi sosial dan batasan yang tumpang tindih antara agama katolik sebagai agama modern dan tradisi asli dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, N., Stephen Hill, & Bryan S. Turner. (2000). The Penguin Dictionary of Sociology. In *Contemporary British Society* (Issue 1). The Penguin Group.
- BPS. (2024). Kabupaten Ende Dalam Angka. <https://endekab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e00494557645d5a98bf261f7/kabupaten-ende-dalam-angka-2024.html>
- Eka Darmaputera. (2001). Memberdayakan komunitas basis. *Spektrum*, 19(1), 71–80.
- Dartanto, T., Edith Zheng Wen Yuan, & Sofiyandi, Y. (2017). *ADB Working Paper Series Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia Asian Development Bank Institute*. <https://www.adb.org/publications/two->
- Fadhil, M., Haris, A., & Muhimmah, B. R. (2023). Kaji Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Inklusif Ekonomi Regional. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(2 Desember), 87–96. <https://doi.org/10.14421/jmes.2022.012-07>
- Firdausy, C. M., & Buhaerah, P. (2023). Landed oligarchy harm schooling contribution to structural change: Lessons learned from Indonesia. *Research Square*, 1–12. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3338213/v1>
- Haryanto, V. & Soukotta, T. (2025). Religion and the Violence of Development: The Case of Flores, Indonesia. *Development (Basingstoke)*. <https://doi.org/10.1057/s41301-025-00451-9>
- Hasbullah, J. (2006). *sosial capital (menuju keunggulan budaya manusia Indonesia*. MR-United Press.
- Howell, S. (2016). Battle of cosmologies: The catholic church, Adat, and ‘Inculturation’ among Northern Lio, Indonesia. *Sosial Analysis*, 60(4), 21–39. <https://doi.org/10.3167/sa.2016.600402>
- Human Development Report 1995. Chapter 1: “The state of human Development”
- Ibrahim, I. N., and T. A. Ali. 2013. Structural Transformation, Poverty and Inequality in
- Ilham Al Majiid, & Nenik Woyanti. (2023). Analisis Ketimpangan Wilayah Dan Potensi Ekonomi. *BISCEER (Business Economic Entrepreneurship)*, 6(1), 25–37.
- Jebarus, Eduard. 2008. *Sejarah Persekolahan di Flores*. Penerbit Ledalero.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, mentality dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Maćkowiak, A. M. (2024). Christian and Indigenous: Multiple “Religions” in Contemporary Toraja Funerals. *Religions*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/rel15091112>
- Muhammad, Y. S., & Aslan. (2025). Peranan Agama Dalam Membentuk Identitas dan Budaya Masyarakat: Studi Kasus Islam Sebagai Teras Identitas Melayu Di Malaysia Dengan Metode Kajian Pustaka. *Juteq*, 2(8), 1404–1416.
- Naiya, I. I., & Manap, T. A. A. (2013). Structural Transformation, Poverty and Inequality in Nigeria: An ARDL Bound Testing Technique. *International Journal of Economics and Finance*, 5(4). <https://doi.org/10.5539/ijef.v5n4p141>
- Nanga, M., & Widjaja, W. (2024). Structural Transformation in the Indonesian Economy: Why does “Financial Development” Matter? *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(2), 213–222. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/ekuilibrium>

- Nenohai, J. N. D. K. (2023). Evaluating the Relationship between Christianity and Indigenous Religion in the Context of the Christian Evangelical Church in Timor (Gereja Masehi Injili di Timor). *Indonesian Journal of Theology*, 11(2), 264–294. <https://doi.org/10.46567/ijt.v11i2.351>
- Nursyifa, A., & Pendidikan Kewarganegaraan, J. (2018). kajian cultural lag dalam kehidupan masyarakat perkampungan budaya betawi setu babakan pada era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKn>
- Perbup Ende No. 26 Tahun 2024_1 (2024). https://www.google.com/search?q=peraturan+bupati+ende+no+26+tahun+2024&oq=peraturan+bupati+ende+no+26+tahun+2024&gs_lcrp.
- Soerjono, Soekanto. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar* (45th ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suardana, M., Darmawan, P. A., & Runtukahu, R. O. (2023). Multicultural Christian Education in an Indonesian Church Context. *Pharos Journal of Theology*, 104(2). <https://doi.org/10.46222/pharosjot.104.28>
- Sumardjo, S., Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2021). Sodality in Peri-Urban Community Empowerment: Perspective of Development Communication and Extension Science. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 29–41. <https://doi.org/10.22500/9202135217>
- Syaifudin, R., Verliana, A. D., Setyadi, S., & Desmawan, D. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(2), 117–124. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1688>
- Tambunan, A. S., Panjaitan, E., N.G., Simanjuntak, Y. P., & Waruwu, L. (2025). Misi Penyebaran Injil Mula-Mula Ke Tanah Karo. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 5544–5554. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- The World Bank. (1990). *World development report. 1990, Poverty*. Oxford University Press.
- Tuhri, M., Maarif, S., & Simarmata, R. (2020). Adat, Islam, and The Idea of Religion in Colonial Indonesia. *Al Albab*, 9(2), 159–178. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v9i2.1390>
- Uran, Lame L. (n.d.). *Sejarah Perkembangan Misi Flores Dioses Agung Ende*.
- Veerasamy, K., Putteeraj, M., & Somanah, J. (2023). Exploring the salience of religious identity on the mental health of the Mauritian adult. *Discover Psychology*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44202-023-00092-4>
- Watts, S., & Munir, T. (2024). The role of religious capital in shaping wellbeing of individuals. *Discover Sosial Science and Health*, 4(1). <https://doi.org/10.1007/s44155-024-00067-3>
- Widyawati, F., Lon, Y. S., & Midun, H. (2025). Mission and inculturation: Preserving local language and culture in the Indonesian Church. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 81(1). <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10516>
- Zainul Hafizi, M. (2024). Perkembangan Islam Di Pulau Lombok: Telaah Historis Melalui Studi Kepustakaan. *Nagri Pustaka*, 2(2), 185–191. <https://journal.yazri.com/index.php/nagripustaka>